



LAPORAN

PELAKSANAAN TUGAS

2024



DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan bentuk pelaporan pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 yang berisi capaian kinerja luaran (output) maupun hasil (outcome) serta serapan anggaran pada tiap-tiap sub kegiatan.

Laporan Pelaksanaan Tugas dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di tahun tersebut serta dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan terkait rencana pembangunan di tahun berikutnya. sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan optimal.

Semoga Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dapat memberi manfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan

Karanganyar, 30 Des 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR


MARTADI, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19650323 198908 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Bupati no 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tugas Pokok Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja.
- b. Perumusan perencanaan bidang teknis bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja
- c. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja.
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas,
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas untuk pelaksana teknis dinas,
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peranan yang sangat strategis khususnya dalam usaha menumbuhkembangkan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab dinas. Adapun urusan pemerintahan tersebut adalah :

- a. Urusan Wajib yang Bukan Pelayanan Dasar
 - Urusan Tenaga Kerja
- b. Urusan Pilihan
 - Urusan Perdagangan
 - Urusan Perindustrian

Sejalan dengan hal tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan program-program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. dan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 8 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 22 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Bupati Karanganyar No. 99 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar;
14. Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah);
15. Peraturan menteri dalam negeri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Bupati Karanganyar No 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026
18. Peraturan Bupati Karanganyar no 35 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024
19. Peraturan Bupati Karanganyar No 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar no 35 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan LPT adalah penyampaian harapan yang akan dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Penyusunan LPT sebagai laporan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2024. Laporan Pelaksanaan Tugas merupakan dokumen pencapaian indikator kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar berdasarkan output dan outcome yang telah ditentukan

LPT bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar juga dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pedoman tersebut merupakan hasil yang telah dicapai pada tahun 2024 dan dapat dijadikan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dapat digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Karanganyar di bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja, secara terencana, terfokus, dan berkesinambungan yang bertumpu pada kondisi, potensi, dan kebutuhan sektor perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja, serta kemampuan dinas.

BAB II

DISKRIPSI UNIT KERJA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disdagperinaker adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, tenaga kerja
2. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, Tugas dan Fungsi dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- Uraian tugas Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga Kerja.
 - b. Perumusan perencanaan bidang perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang tenaga kerja.
 - c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi pengendalian fasilitasi bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
 - d. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.
 - e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
 - f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas.
 - g. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi DISDAGPERINAKER Kab. Karanganyar terdiri atas Sekretariat, Bidang Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan serta UPT Balai Latihan Kerja.

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengorganisasian, pemantauan evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Fungsi sekretaris Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Pengorganisasian tatalaksana;
- e. Pengorganisasian dan penyusunan peraturan perundang undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengorganisasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan barang/ jasa.;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan ,

evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset serta pelaporan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, Kerjasama, kerarsipan, kehumasan, informasi dan dokumentasi, ketatalaksanaan, dan kepegawaian Disdagperinaker.

4. Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perdagangan.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar.
- b. Pelaksanaan koordinasi teknis bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar.
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang usaha perdagangan, perlindungan konsumen, dan pengelolaan pasar.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam struktur organisasi Bidang Perdagangan dan pasar terdapat jabatan fungsional Pengawas Perdagangan, dan Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan.

5. Kepala Bidang Tenaga Kerja

Kepala bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Kepala bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang penempatan, pendaftaran , pelatihan, dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan koordinasi bidang penempatan, hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penempatan hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan, hubungan industrial, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Struktur organisasi Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdapat jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Instruktur.

6. Kepala UPT

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang pada Disdagperinaker dapat dibentuk UPT, yang dipimpin oleh kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Standart Operating Procedure (SOP)

1. Sekretariat

- a. SOP Pengelolaan Surat Masuk
- b. SOP Barang Milik Daerah
- c. SOP Unggah Informasi
- d. SOP Pengelolaan Surat Keluar
- e. SOP Prosedur Penyusunan Laporan Retribusi Jasa Usaha
- f. SOP Laporan Bulanan
- g. SOP Pelaksanaan Verifikasi SPJ
- h. SOP Penyusunan Laporan Retribusi Pelayanan Pasar
- i. SOP Pembuatan Keputusan Kepala Dinas
- j. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- k. SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
- l. SOP Prosedur Penyusunan SPJ
- m. SOP Prosedur Pengajuan SPP SPM GU dan LS

2. Bidang Perdagangan

- a. SOP Pelayanan Tera dan Tera Ulang di Kantor

3. Bidang Perindustrian

- a. SOP Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK/I)
- b. SOP Pelayanan Pendaftaran Lowongan Kerja (AK/III)
- c. SOP Penerbitan Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
- d. SOP Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)
- e. SOP Penerbitan Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

4. Bidang Hubungan Industrial dan Wasnaker

- a. SOP Pencatatan Organisasi Pekerja (SP/SB)
- b. SOP Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- c. SOP Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
- d. SOP Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- e. SOP Pencatatan Lembaga Kerjasama BIPARTIT
- f. SOP Tanda Bukti Pelaporan Pekerjaan Penunjang
- g. SOP Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

5. UPT Balai Latihan Kerja

- a. SOP Penanganan Surat Keluar
- b. SOP Penanganan Surat Masuk
- c. SOP Perbaikan Sarana dan Prasarana
- d. SOP Permintaan Barang
- e. SOP Penataan Taman
- f. SOP Penataan Asrama
- g. SOP Penggunaan Kendaraan Dinas
- h. SOP Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
- i. SOP Pendaftaran Pelayanan Calon Peserta Pelatihan
- j. SOP Pelayanan Seleksi Calon Peserta Pelatihan
- k. SOP Pelayanan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pola Pelatihan 240 JP
- l. SOP Materi Pelatihan
- m. SOP Fasilitasi Perlengkapan, Peralatan dan bahan Pelatihan

C. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan

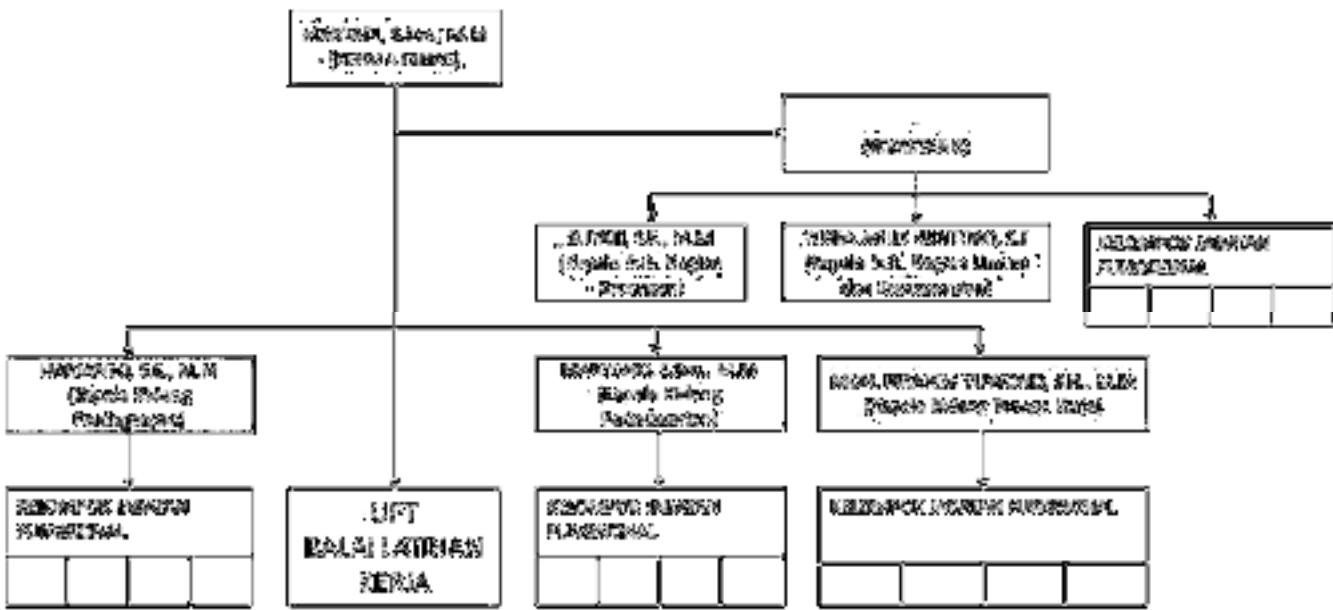
1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Psar Tradisional, Pusat Perbe;anjaan dan Pasar Modern
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No 25 Tahun 2019 Tentang Pengembangan , Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No1 Tahun 2022 Retribusi Jasa Usaha.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar No. 49 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, sebagaimana terlampir adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Jabatan Fungsional
- c. Bidang Tenaga Kerja membawahkan : jabatan fungsional
- d. Bidang Perdagangan membawahkan : jabatan fungsional
- e. Bidang Perindustrian membawahkan : jabatan fungsiona
- f. Unit Pelaksana Teknis;

Bagan Susunan Organisasi
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja



E. Kepegawaian
Susunan Kepegawaian

Kondisi aparatur atau pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar menurut jenisnya dapat dibedakan dari pegawai struktural, pegawai fungsional, staf dan Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan daftar keseluruhan pegawai per tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Daftar Pegawai OPD
1.1) Sekretariat

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Martadi, S.Sos., M.M	19650323 198908 1 001	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Dinas
2	Yosea Agus Kuntoro, ST	19840808 201101 1 010	Penata Tingkat I	III/d	Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3	Warsito	19700125 200701 1 015	Pengatur Muda	III/a	Petugas Keamanan Pada Sub Bag Umum & Kepegawaian

4	Yulita Wahyu K, A.md	19860709 201101 2 012	Penata Muda Tingkat I	III/B	Calon Arsiparis
5	Agus Sriyono	19840817 201001 1 003	Juru	I/d	Pelaksana pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Andyk Endrasto, SE	19770427 200801 1 016	Pengatur Muda	III/a	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
7	Suyati, SE, MM	19711001 199403 2 004	Penata Tk I	IV/a	Ka. Sub. Bagian Keuangan
8	Okvitri Wahyuningrat, Amd	19811004 200803 2 003	Penata Muda	III/b	Penata Laporan Keuangan Sub Bag Keuangan
9	Purwono Bodro Sabani	19840525 200901 1 012	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Penata Laporan Keuangan Pd Sub Bag Keuangan
10	Sri Wahyuni, S.E	19730808 200701 2 014	Pengatur Tk. I	III/a	Penata Laporan Keuangan Pd Sub Bag Keuangan
11	Isti Wuryani, SE	19751229 200801 2 009	Pengatur Tk. I	II/d	Verifikator Keuangan pd Sub Bag Keuangan
12	Sri Antiningsih, S.P., M.Eng	19760417 200604 2 004	Pembina	IV/a	Perencana Ahli Muda
13	Ika Wardaningsih, S.S.T	19880804 201101 2 017	Penata	III/d	Analisis Data dan Informasi

1.2) Bidang Tenaga Kerja

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Moh. Ibrahim Yuwono, SH.MM	19780728 200501 1 008	Pembina	IV/a	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
2	Suparno, S.I.P.,M.M	19650511 199203 2 003	Penata Tingkat I	IV/a	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
3	Tri Hastuti H, S.Sos	19701116 199303 2 003	Penata Tingkat I	III/d	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan Pada Seksi Pendaftaran TK
4	Juniatiningsih, S.A.P	19860513 201101 2 020	Penata Muda	III/a	Pranata Komputer Mahir
5	Isti Titi Sarwosih, S.Sos, MM	19670507 199210 2 001	Penata Tk. I	III/d	Pengantar Kerja Ahli Muda
6	Dadi Santoso, S.Psi	19671120 199803 1 003	Penata Tk. I	III/d	Penyuluh Tenaga Kerja pd Seksi Pelatihan & Produktivitas

7	Sumarno, SH	19680312 199803 1 014	Pembina Tingkat I	IV/C	Mediator HI Ahli Madya
8	Sugiarti, SE	19690513 199403 2 003	Penata TK I	III/d	Analisis Perloindungan dan Pemberdayaan TKI
9	Benidikto Dwiputra Swara, S.Sos	19900131 202012 1 011	Penata Muda	III/a	Analisis Tenaga Kerja
10	Habibatul Hilma, S.Sos	19971104 202012 2 009	Penata Muda	III/a	Analisis TenAga Kerja
11	M. Agus Fauzi, SE	19740420 200604 1 007	Penata Tk. I	III/d	Analisis Kompetensi & Kualifikasi Ketenagaan Pada Seksi Pelatihan & Produktivitas

1.3) UPT Balai Pelatihan Kerja

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Toni Setiawan, S.S.T.P.,M.SI	19920929 201406 1 001	Penata	III/c	Kepala UPT Balai Pelatihan Kerja
2	Tulus Wibowo, A.Md	19730827 200604 1 008	Penata Muda Tk. I	III/c	Kepala Tata Usaha UPT BLK
3	Parmin	19680130 200701 1 009	Pengatur	II/c	Pramu Kebersihan pada Sub Bag. Umum dan Kepegawaian
4	Ngadiyo	19690513 200801 1 012	Juru Tk.I	I/d	Pelaksana Kegiatan
5	Daryanto, S.Pd	19640212 198303 1 004	Pembina Utama Muda	IV/c	Instruktur Madya
6	Dunus Ardian, Amd	19850303 201101 1 012	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana Lanjutan
7	Imam Riyadi, S.E	19730917 199403 1 002	Penata Tk. I	III/d	Instruktur Ahli Muda
8	Anang Fajar Riyadin, A.Md	19890511 201101 1 006	Penata	III/d	Instruktur Penyelia
9	M Yusuf Marzuki, ST	19780711 201001 1 006	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama
10	Aris Wandu, A.Md	19761217 201101 1 003	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana Lanjutan
11	Soni Setyawan, A.Md	19831201 201101 1 009	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Ahli Muda

12	Joko Purnomo, A.Md	19830214 201101 1 008	Penata Muda	III/a	Instruktur Mahir
14	Ainun Najib, Amd	19930702 201503 1 003	Penata Muda	III/b	Instruktur Pelaksana
13	Ichsan Junaidi, Amd	19810227 2015 03 1 001	Pengatur	Ili/d	Instruktur Mahir
14	Yuanita Sulissetiyo R, A.md	19900629 201503 2 004	Penata Muda	III/a	Instruktur Pelaksana Lanjutan
15	Muslih Hadi Harjantho, S.Pd	19911013 201903 1 009	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama
16	M. Burhan Yasin, ST	19850605 201903 1 009	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama
17	Afrizal Rosyid Fanani, S,Pd	199712042023211003	Penata Muda	IX	Intruktur Ahli Pertama
18	Rahmat Apriyanto, S.Pd	199704282023211 004	Penata Muda	IX	Intruktur Ahli Pertama

1.4) Bidang Perdagangan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Harjanto, S.E., M.M	19660507 199203 1 012	Penata Tk. I	III/d	Ka. Bid Perdagangan dan Pasar
2	Martini, S.E	19710124 199103 2 005	Penata Tk. I	III/d	Analisis Perdagangan Pada Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
3	Aries Budi Prasetyo N, S.T	19850114 201101 1 006	Penata	III/d	Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen
4	Marcellinus Ferri P.k, A.md	19890602 201101 1 002	Penata Muda	III/b	Calon Penera
5	Priyono	19680505 200902 1 001	Pengatur TK.I	II/d	Petugas Keamanan Pada Sub Bag Umum & Kepeg
6	Suyanto	19690905 200902 1 001	Penata Muda	II/d	Pengaministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar
7	Pujiyanto	19780301 201001 1 002	Pengatur Tk I	II/d	Pengadministrasi Umum
8	Dedi Wahyu Nugroho, S.S.T	19870924 201101 1 008	Penata Tk. I	III/d	Penyusun Perkembangan Harga & Pengkajian Psr Pada Seksi Pengembangan Pasar
9	Fitri Sis Wulandari	1970924 200701 2 013	Penata Tk. I	III/a	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar

1.5) Pengelola Pasar

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Sri Hartoyo	19700603 199503 1 001	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Jungke)
2	Tarjimin	19670312 200701 1 032	Pengatur	II/c	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pd Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
3	Gunarno	19680709 200701 1 014	Pengatur Muda	II/a	Pelaksana pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
4	Joko Wiratno	19660806 200701 1 026	Pengatur Tk. I	II/d	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Malangjiwan)
5	Sutarni	19700315 200701 2 013	Pengatur	II/b	Pelaksana pada Seksi Penataan dan Keamanan Ps Malangjiwan
6	Kristiyono	19691109 200701 1 017	Penata Muda	II/d	Juru Pungut Retribusi (Koordinator Karangpandan)
7	Wagiyo	19681231 200701 1 078	Pengatur	II/c	Juru Pungut Retribusi Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
8	Supardi, SE	19750218 200801 1 009	Penata	II/d	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Jambangan)
9	Siti Harsini	19660608 198603 1 009	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Matesih)
10	Triyanto	19660909 200701 1 015	Penata Muda		Pengelola Pasar (Koordinator Pasar kebakkramat)
11	Sri Wahyuni	19670112 200701 2 012	Penata Muda	III/a	Pengelola Pasar (Koordinator pasar belang)
12	Wahyono	19750706 200801 1 018	Pengatur Tk.I	II/d	Pengelola Pasar (Koordinator pasar Tegalgedhe)
13	Joko Purnomo	19700914 200701 1 019	Pengatur	II/c	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Palur)
14	Sularno	19680211 200801 1 007	Pengatur	II/c	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Tawangmangu)
15	Sri Handayani	19761030 199803 2 002	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Gondangrejo)
16	Wahyono	19780420 200902 1 002	Juru Tingkat I	I/d	Pelaksana pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar

17	Triyanto	19781223 201001 1 002	Pengatur Tk. I	II/d	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungann Akses Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
18	Paiman	19690705 200701 1 043	Pengatur	II/c	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Kwadungan)
19	Sarjono	19751228 200701 1 008	Pengatur Tk.I	III/a	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Jatipuro)
20	Marsini	19691001 200701 2 018	Penata Muda	III/a	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
21	Sundaryanto	19780606 201001 1 021	Pengatur Muda Tk. I	II/b	Pengadministrasi Pengamanan & Perlindungan Akses pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar
22	Mulyadi	19680618 200701 1 021	Penata Muda	III/a	Pengelola Pasar (Koordinator Ps. Mojogedang)
23	Suwardi	19740905 201001 1 002	Pengatur Tk. I	II/d	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pada Seksi Penataan dan Keamanan Pasar Belang
24	Sabardiyanti, SE	19670306 198603 2 003	Penata Tingkat I	III/d	Pengelola Pasar (Koordinator Pasar Jumapolo)
25	Saryanto	19710818 200902 1 001	Pengatur TK.I	II/d	Juru Pungut Retribusi Pd Seksi Penataan dan Kemananan Pasar

1.6) Bidang Perindustrian

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Maryono, S.Sos., M.M	19671231 198902 1 012	Pembina	IV/a	Kepala Bidang Perindustrian
2	Fitriah Nikmatul M, S.T	19860905 202203 2 003	Penata Muda	III/a	Pengawasa Industri
3	Agustina Purwitasari, S.T	19870819 202012 2 003	Penata Muda	III/a	Analisis Industri

2. Daftar Pejabat Struktural SKPD Yang Terisi

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Martadi, S.Sos., M.M	19650323 198908 1 001	Pembina Utama Muda	IV/c	Kepala Dinas
3	Yosea Agus Kuntoro, ST	19840808 201101 1 010	Penata Tingkat I	III/d	Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Suyati, SE, MM	19711001 199403 2 004	Penata Tk I	IV/a	Ka. Sub. Bagian Keuangan
5	Maryono, S.Sos, M.M	19671231 198902 1 012	Pembina	IV/a	Kabid. Perindustrian
6	Moh. Ibrahim Yuwono, SH,MM	19780728 200501 1 008	Pembina	IV/a	Kabid. Tenaga Kerja
7	Toni Setiawan, S.S.T.P.,M.Si	19920929 201406 1 001	Penata	III/c	Kepala UPT BLK
8	Tulus Wibowo, A.Md	19730827 200604 1 008	Penata Muda Tk. I	III/c	Kepala Tata Usaha UPT BLK

3. Daftar Pejabat Struktural SKPD Yang Belum Terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
1	Sekretaris	III a

4. Daftar Pejabat Fungsional SKPD

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	JABATAN
1	Sri Antiningsih, S.P., M.Eng	19760417 200604 2 004	Pembina	IV/a	Perencana Ahli Muda
2	Suparno, S.I.P., M.M	19680101 198603 1 003	Pembina	IV/a	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda
3	Sumarno, SH	19680312 199803 1 014	Pembina Tingkat I	IV/b	Mediator HI Ahli Madya
4	Dunus Ardian, S.T	19850303 201101 1 012	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Ahli Muda
5	Imam Riyadi, S.E	19730917 199403 1 002	Penata Tk. I	III/d	Instruktur Ahli Muda
6	Anang Fajar Riyadin, S.T	19890511 201101 1 006	Penata	III/d	Instruktur Ahli Muda
7	M Yusuf Marzuki, ST	19780711 201001 1 006	Penata Muda	III/a	Instruktur Ahli Muda
8	Aris Wandu, S.T	19761217 201101 1 003	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana Lanjutan
9	Soni Setyawan, S.T	19831201 201101 1 009	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana
10	Joko Purnomo, A.Md	19830214 201101 1 008	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Mahir
11	Ainun Najib, Amd	19930702 201503 1 003	Penata Muda Tk. I	III/b	Instruktur Pelaksana

12	Ichsan Junaidi, Amd	19810227 2015 03 1 001	Penata Muda	III/a	Instruktur Mahir
13	Yuanita Sulissetiyo R, A.md	19900629 201503 2 004	Penata Muda	III/a	Instruktur Pelaksana Lanjutan
14	Muslih Hadi Harjantho, S.Pd	19911013 201903 1 009	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama
15	M. Burhan Yasin, ST	19850605 201903 1 009	Penata Muda	III/a	Instruktur Pertama

5. Daftar Pejabat Fungsional SKPD Yang Belum Terisi (Umum/Khusus)

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pengantar Kerja	2 Orang
2	Analisis Perdagangan	1 Orang
3	Penyuluh Perindustrian	1 Orang
JUMLAH		4 Orang

Susunan Pejabat Struktural Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas : Martadi, S.Sos., M.M
2. Plt Sekretaris : Harjanto, SE, M.M
- a. Kepala Sub Bagian Keuangan : Suyati , SE,MM
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Yosea Agus Kuntoro, S.T
3. Kepala Bidang Tenaga Kerja : Moh. Ibrahim Yuwono, S.H., M.M
4. Kepala Bidang Perdagangan : Harjanto, SE, M.M
5. Kepala Bidang Perindustrian : Maryono, S.E, MM
6. Kepala UPT Balai Latihan Kerja : Toni Setiawan, S.S.T.P., M.Si
- Kepala TU UPT Balai Latihan Kerja : Tulus Wibowo, A.Md

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/ kota	0,00 dokumen Ket.:	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/ kota	0,00 % Ket. :
	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0,00 dokumen Ket.:			
	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/ kota	0,00 Ket.:			
2	1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100,00 % Ket.:	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	56,00 % Ket. :
	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	30,44 % Ket.:			
	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	38,00 Ket.:			
	4. Persentase LPK yang terakreditasi	50,00 % Ket.:			
	5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	98,38 % Ket.:			
	6. Jumlah penganggur yang dilatih	13.765,00 orang Ket.:			

	7.	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100,00 % Ket.:			
	8.	Persentase penyerapan lulusan	68,16 % Ket.:			
	9.	Lulusan bersertifikat kompetensi	7.143,00 orang Ket.:			
	10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	522,00 orang Ket.:			
	11.	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	11,00 jenis Ket.:			
3	1.	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	71,13 % Ket.:	Tingkat produktivitas tenaga kerja	PDRB tahun berjalan (Atas Dasar Harga Konstan) ----- x 100% Jumlah tenaga kerja	59,45 % Ket. :
	2.	Data tingkat produktivitas total	59,45 % Ket.:			
	3.		0,00 Ket.:			
4	1.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	62,18 % Ket.:	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ----- x 100% Jumlah Perusahaan	80,17 % Ket. :
	2.	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	76,31 % Ket.:			
	3.	Rekapitulasi	23.61			

	tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	6,00 orang Ket.:			
4.	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	47,61 % Ket.:			
5.	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	40,23 % Ket.:			
6.	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	4,37 % Ket.:			
7.	Jumlah mogok kerja	0,00 orang Ket.:			
8.	Jumlah penutupan perusahaan	0,00 perusahaan Ket.:			
9.	Jumlah perselisihan kepentingan	4,00 orang Ket.:			
10.	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0,00 perselisihan Ket.:			
11.	Jumlah perselisihan PHK	36,00 orang Ket.:			
12.	Jumlah pekerja/buruh yang ter-	112,00			

	PHK	orang			
		Ket.:			
	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0,00 orang Ket.:			
	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/ kota yang diberdayakan	1,00 Lembaga Ket.:			
	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	26,47 % Ket.:			
5	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota	1.656,00 lowongan Ket.:	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/ kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencari kerja yang terdaftar	79,14 % Ket. :
	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten/ kota	1.654,00 orang Ket.:			
	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten/ kota	36,00 unit Ket.:			
	4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/ kota	170,00 orang Ket.:			
	5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0,00 orang Ket.:			
	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja	0,00 Lembaga			

	Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten/ kota	Ket.:			
7.	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota	150,00 dokumen Ket.:			
8.	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1.309,00 orang Ket.:			
9.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	40,00 orang Ket.:			
10.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	522,00 orang Ket.:			
11.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0,00 orang Ket.:			
12.	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	254,00 orang Ket.:			
13.	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	80,00 orang Ket.:			

	purna dan keluarganya				
	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	1,00 unit Ket.:			

C. URUSAN PILIHAN

1. Perdagangan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0,00 Ket.:	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	100,00 % Ket. :
	2. Persentase penerbitan TDG	0,00 Ket.:			
	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0,00 Ket.:			
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0,00 Ket.:			
	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah kabupaten/ kota	0,00 Ket.:			
	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0,00 Ket.:			
	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0,00 Ket.:			
	8. Persentase koefisien variasi harga antar	0,00 Ket.:			

	waktu				
2	1. Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0,00 Ket.:	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi ----- x 100% RDKK	76,60 % Ket. :
3	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/ tera ulang dalam tahun berjalan	0,00 Ket.:	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/ kota	88,03 % Ket. :
	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0,00 Ket.:			

2. Perindustrian

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	0,00 Kawasan Industri Ket.:	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	34,68 % Ket. :
2	1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	50,00 % Ket.:	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan yang disepakati dengan capaian pada akhir tahun tersebut dan setiap sasaran memiliki bobot 20%. dokumen perencanaan pembangunan industri daerah yang terdiri dari: 1. Pertumbuhan	50,00 % Ket. :

			PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 30\%) = 30\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 30\%) = 27\%$; • Jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 30\%) = 24\%$; • dst 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi (satuan persentase) diperoleh dengan mengalikan persentasi capaian sasaran Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi dengan bobot maksimal 30 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 30\%) = 30\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 30\%) = 27\%$; • Jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 30\%) = 24\%$;	
--	--	--	---	--

			• dst 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan orang) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 15 %, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 15\%) = 15\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 15\%) = 13,5\%$; • Jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 15\%) = 12\%$; • dst 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi (satuan US\$) diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 5%, dengan rumus: $\text{Capaian} \times \text{Bobot} = \text{hasil capaian sasaran}$ Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan $(100\% \times 5\%) = 5\%$; • Jika Capaian 90% maka perhitungan $(90\% \times 5\%) = 4,5\%$; • Jika Capaian 80% maka perhitungan $(80\% \times 5\%) = 4\%$; • dst	
--	--	--	--	--

				5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terdiri dari Penanaman Modal Asing (satuan US\$) dan Penanaman Modal Dana Negeri (satuan Rp.) Provinsi diperoleh dengan mengalikan persentase capaian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi dengan bobot maksimal sebesar 20 %, dengan rumus: Capaian x Bobot = hasil capaian sasaran Contoh perhitungan: • Jika capaian 100% maka perhitungan (100% X 20%) = 20%; • Jika Capaian 90% maka perhitungan (90% x 20%) = 18% ; • Jika Capaian 80% maka perhitungan (80% x 20%) = 16% ; • dst	
3	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan 2. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	28,05 % Ket.: 1,10 % Ket.:	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0,00 Ket. :
4	1.	0,00 Ket.:	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	0,00 Ket. :
5	1.	0,00 Ket.:	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil	0,00 Ket. :

			Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/ kota	pemantauan -----x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	
6	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan indusri di kabupaten/ kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kabupaten/ kota	0,00 Ket.:	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Informasi industri: • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) • Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) • Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2. Kelengkapan informasi industri: • Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) • Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) • Informasi bahan bakar/ energy (10%) • Informasi tenaga kerja (10%) • Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	0,00 Ket. :

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.093.000,00 Persentase: (81,86%)	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD 1 dokumen	1 (100%)		
				2) Fasilitasi Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 174.000.000,00 Realisasi: Rp. 173.586.000,00 Persentase: (99,76%)	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 laporan	1 (100%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA	1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi:	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 (100%)		

			A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.920.600,00 Persentase: (97,35%)	penyusunan dukumen perubahan RKA- SKPD 1 dokumen			
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.922.100,00 Persentase: (97,40%)	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dukumen RKA- SKPD 1 dokumen	1 (100%)		
				3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.848.600,00 Persentase: (96,97%)	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dukumen DPA- SKPD 1 dokumen	1 (100%)		
				4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 43.000.000,00 Realisasi: Rp. 42.704.200,00 Persentase:	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	2 (100%)		

				(99,31%)	lapaoran capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPDJumlah laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lapaoran capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 2			
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 16.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.490.000,00 Persentase: (96,81%)	Jumlah laporan keuangan bulan an/triwulan/sem esteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulan an/triwulan/sem esteran SKPD 12 laporan	12 (100%)		
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB	1) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi:	Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil	1 (100%)		

			UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.998.300,00 Persentase: (99,94%)	koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD 1 dokumen			
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Anggaran: Rp. 615.000.000,00 Realisasi: Rp. 611.735.000,00 Persentase: (99,47%)	jumlah dokumen monotoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai 1 dokumen	1 (100%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 65.000.000,00 Realisasi: Rp. 64.460.000,00 Persentase: (99,17%)	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara 1 paket	1 (100%)		

			Pemerintahan Daerah					
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 282.854.000,00 Realisasi: Rp. 278.182.800,00 Persentase: (98,35%)	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1	1 (100%)		
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 4.665.000,00 Realisasi: Rp. 4.665.000,00 Persentase: (100,00%)	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 dokumen	1 (100%)		
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	1) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Anggaran: Rp. 8.049.700,00 Realisasi: Rp. 7.775.600,00 Persentase: (96,59%)	Jumlah data obyek, subyek dan wajib retribusi daerah 1 dokumen	1 (100%)		

			Kewenangan Perangkat Daerah					
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 537.257.400,00 Realisasi: Rp. 531.942.700,00 Persentase: (99,01%)	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 1	1 (100%)		
				2) Pengadaan Mebel Anggaran: Rp. 103.300.000,00 Realisasi: Rp. 93.500.000,00 Persentase: (90,51%)	jumlah paket yang disediakan 20	20 (100%)		
				3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 151.500.000,00 Realisasi: Rp. 145.600.000,00 Persentase: (96,11%)	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 7	7 (100%)		

				4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 76.500.000,00 Realisasi: Rp. 75.586.200,00 Persentase: (98,81%)	jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 1 unit	1 (100%)		
			j. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1) Pengolahan Data Retribusi Daerah Anggaran: Rp. 11.950.000,00 Realisasi: Rp. 11.871.200,00 Persentase: (99,34%)	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah 12 laporan	12 (100%)		
			k. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat	1) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 351.800.000,00 Realisasi: Rp. 347.206.400,00 Persentase: (98,69%)	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan 1	1 (100%)		

			Daerah					
			I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 10.679.907.768,00 Realisasi: Rp. 9.437.463.504,00 Persentase: (88,37%)	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 107 orang/bulan	92 (85,98%)		
			m . PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 288.770.000,00 Realisasi: Rp. 277.822.177,00 Persentase: (96,21%)	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 laporan	1 (100%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 3.733.937.000,00 Realisasi: Rp. 3.718.628.000,00 Persentase:	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan	1 (100%)		

				(99,59%)				
			n. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 200.000.000,00 Realisasi: Rp. 194.239.900,00 Persentase: (97,12%)	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara 1 paket	1 (100%)		
			o. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 laporan	1 (100%)		
			p. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran:	Jumlah paket komponen instalasi listrik/p enerangan	1 (100%)		

			DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 14.288.000,00 Realisasi: Rp. 14.288.000,00 Persentase: (100,00%)	bangunan kantor yang disediakan 1 paket			
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 27.400.000,00 Realisasi: Rp. 23.384.000,00 Persentase: (85,34%)	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1	1 (100%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 231.675.900,00 Realisasi: Rp. 231.293.151,00 Persentase: (99,83%)	jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 laporan	1 (100%)		
			q. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi	1) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Anggaran: Rp. 16.700.000,00 Realisasi: Rp. 15.780.200,00 Persentase: (94,49%)	jumlah laporan hasil penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah 1	1 (100%)		

			Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
			r. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 21.420.000,00 Realisasi: Rp. 21.335.873,00 Persentase: (99,61%)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 dokumen	3 (100%)		
			s. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.783.600,00 Persentase: (97,84%)	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD 2 dokumen	2 (100%)		
				2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi dan	1 (100%)		

				pada SKPD Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.530.850,00 Persentase: (96,87%)	penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD 1 laporan			
			t. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Anggaran: Rp. 409.420.000,00 Realisasi: Rp. 391.546.450,00 Persentase: (95,63%)	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan 800	800 (100%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	TENAGA KERJA		a. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pengelolaan Informasi	1) Job Fair/Bursa Kerja Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.956.200,00 Persentase: (99,82%)	Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja 1500 orang	1.500 (100%)		

			Pasar Kerja					
			b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.988.000,00 Persentase: (99,40%)	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 2 dokumen	2 (100%)		
			c. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 175.000.000,00 Realisasi: Rp. 172.938.100,00 Persentase: (98,82%)	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 1 lembaga	1 (100%)		
			d. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan	1) Pelayanan antar Kerja Anggaran: Rp. 6.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.960.500,00	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja 50 orang	50 (100%)		

			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase: (99,34%)				
			e. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Anggaran: Rp. 27.200.000,00 Realisasi: Rp. 26.331.200,00 Persentase: (96,81%)	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 4500 orang	4.500 (100%)		
			f. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	1) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.386.400,00 Persentase: (69,32%)	Terlaksananya Pemberdayaan PM Purna Penempatan 15 orang	15 (100%)		
			g. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.107.200,00 Persentase: (97,02%)	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 50 lembaga	50 (100%)		

			h. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.808.000,00 Persentase: (98,08%)	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15 perusahaan	15 (100%)		
			i. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.751.800,00 Persentase: (98,35%)	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 20 perusahaan	20 (100%)		

			j. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 44.096.750,00 Realisasi: Rp. 43.845.000,00 Persentase: (99,43%)	Tersedianya sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota 2 unit	2 (100%)		
			k. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.622.500,00 Persentase: (92,45%)	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 10 perusahaan	10 (100%)		
			l. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pengesahan Peraturan	1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.777.000,00	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan	20 (100%)		

			Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase: (98,51%)	Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 20 perusahaan			
			m. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.997.800,00 Persentase: (99,89%)	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 perusahaan	2 (100%)		
			n. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab	1) Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anggaran: Rp. 8.000.000,00 Realisasi: Rp. 7.993.750,00 Persentase: (99,92%)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	40 (100%)		

			upaten/Kota		40 orang			
			o. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 24.469.000,00 Persentase: (97,88%)	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja) 1500 orang	1.500 (100%)		
			p. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.796.500,00 Persentase: (93,22%)	Tersedianya sumber daya perizinan LPKS secara terintegrasi 4 perizinan	4 (100%)		
			q. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk	1) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.509.750,00 Persentase: (95,10%)	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar	1 (100%)		

			Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 laporan			
			r. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1)	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.714.200,00 Persentase: (98,09%)	Terlaksananya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 20 orang	20 (100%)	
			s. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL, Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1)	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.912.500,00 Persentase: (98,25%)	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 1 laporan	1 (100%)	
				2)	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan	30 (100%)	

				Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.786.250,00 Persentase: (97,86%)	Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 perusahaan			
			t. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.781.500,00 Persentase: (98,54%)	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 100 orang	100 (100%)		
			u. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA, Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Anggaran: Rp. 8.927.250,00 Realisasi: Rp. 7.678.200,00 Persentase: (86,01%)	Tersusunnya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 1 dokumen	1 (100%)		
			v. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA, Kegiatan	1) Perluasan Kesempatan Kerja Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.632.400,00	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja 25 orang	25 (100%)		

			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase: (98,16%)				
			w PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Anggaran: Rp. 1.725.523.000,00 Realisasi: Rp. 1.688.630.055,00 Persentase: (97,86%)	Lulusan Peserta Pelatihan yang meningkat keterampilan kerjanya 170 orang	170 (100%)		

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PERDAGANGAN		a. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN, Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin	1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Anggaran: Rp. 6.249.500,00 Realisasi: Rp. 6.207.300,00 Persentase: (99,32%)	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	15 (100%)		

			Usaha Toko Swalayan		Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 15 orang			
			b. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAF TARAN PERU SAHAAN, Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1) Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang Anggaran: Rp. 4.510.000,00 Realisasi: Rp. 4.417.400,00 Persentase: (97,95%)	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 15 dokumen	15 (100%)		
			c. PROGRAM P ENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI P ERDAGANGA N, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Anggaran: Rp. 573.500.000,00 Realisasi: Rp. 572.967.550,00 Persentase: (99,91%)	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 17 unit	17 (100%)		
			d. PROGRAM P ENGEMBANG AN EKSPOR, Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang	1) Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Anggaran: Rp. 6.615.900,00 Realisasi: Rp. 6.613.800,00 Persentase:	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 17	17 (100%)		

			Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(99,97%)	pelaku usaha			
				2) Pameran Dagang Lokal Anggaran: Rp. 38.502.000,00 Realisasi: Rp. 38.276.600,00 Persentase: (99,41%)	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 40 pelaku usaha	40 (100%)		
			e. PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Anggaran: Rp. 45.000.000,00 Realisasi: Rp. 44.209.940,00 Persentase: (98,24%)	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 2000 unit	2.000 (100%)		
			f. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang	17 (100%)		

			KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1 (Satu) Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 12.232.600,00 Realisasi: Rp. 12.229.700,00 Persentase: (99,98%)	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota 17 laporan			
			g. PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI, Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 200.000.000,00 Realisasi: Rp. 197.547.200,00 Persentase: (98,77%)	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri 30 UMKM	30 (100%)		
			h. PROGRAM PENINGKATAN SARANA	1) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan	17 (100%)		

			DISTRIBUSI PERDAGANGAN, Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.995.600,00 Persentase: (99,98%)	Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 17 dokumen			
		i.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING, Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.940.450,00 Persentase: (99,60%)	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 17 laporan	17 (100%)		
		j.	PROGRAM Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Anggaran: Rp. 477.900.000,00 Realisasi:	Jumlah ketersediaan sarana perdagangan 17 unit	17 (100%)		

			N, Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 471.640.200,00 Persentase: (98,69%)				
2.	PERINDUSTRIAN		a. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL, Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Anggaran: Rp. 2.200.000,00 Realisasi: Rp. 2.164.200,00 Persentase: (98,37%)	Jumlah Dokumen hasil publikasi data industri melalui SIINas 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
				2) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Anggaran: Rp. 45.000.000,00	Jumlah Dokumen terkait fasilitasi pengumpulan data industri IKM pada SIINAs 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		

				Realisasi: Rp. 44.701.500,00 Persentase: (99,34%)				
			b. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI, Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Anggaran: Rp. 8.200.000,00 Realisasi: Rp. 8.084.600,00 Persentase: (98,59%)	Jumlah laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan berusaha sektor perindustrian 12 laporan	12 laporan (100.00%)		
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 6.800.000,00 Realisasi: Rp. 6.785.600,00	Jumlah laporan pengawasan terhadap Perijinan Berusaha sektor Perindustrian 12 laporan	12 laporan (100.00%)		

				Persentase: (99,79%)				
				3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 6.800.000,00 Realisasi: Rp. 6.785.600,00 Persentase: (99,79%)	Jumlah laporan pengawasan terhadap Perijinan Berusaha sektor Perindustrian 12 laporan	12 laporan (100.00%)		
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 6.800.000,00 Realisasi: Rp. 6.785.600,00 Persentase: (99,79%)	Jumlah laporan pengawasan terhadap Perijinan Berusaha sektor Perindustrian 12 laporan	12 laporan (100.00%)		
			c. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Anggaran: Rp. 47.900.000,00 Realisasi: Rp. 46.581.710,00 Persentase:	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		

			Industri Kabupaten/Kota	(97,25%)				
				2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.887.000,00 Persentase: (99,44%)	Jumlah Dokumen / Laporan terkait IKM yang menerima fasilitasi 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
				3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.947.850,00 Persentase: (99,65%)	Jumlah Dokumen /Laporan terkait IKM yang telah menerima fasilitasi dan pelatihan 2 dokumen	2 dokumen (100.00%)		
				4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Anggaran: Rp. 1.465.965.000,00 Realisasi: Rp. 1.447.314.725,00 Persentase: (98,73%)	Jumlah Dokumen / Laporan terkait IKM yang menerima bimbingan teknis atau pengembangan produk atau promosi dan pemasaran produk industri atau kemitraan IKM 3 dokumen	3 dokumen (100.00%)		

			d. PROGRAM P ENGELOLAA N SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL, Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kot a	1) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Anggaran: Rp. 2.100.000,00 Realisasi: Rp. 2.068.550,00 Persentase: (98,50%)	Jumlah Dokumen terkait Pemantauan dan evaluasi Data Industri IKM pada SIINas 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
			e. PROGRAM P ERENCANAA N DAN PEMB ANGUNAN INDUSTRI, Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabup aten/Kota	1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.744.700,00 Persentase: (94,89%)	Jumlah dokumen RPIK 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Nihil

F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

	<i>Nihil</i>
G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	<i>Nihil</i>
H. UNSUR KEWILAYAHAN	
	<i>Nihil</i>
I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	<i>Nihil</i>
J. UNSUR KEKHUSUSAN	
	<i>Nihil</i>

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	SI BAYARNO	Si Bayarno merupakan program E Retribusi, yaitu penarikan retribusi yang dilakukan secara online. Pedagang diwajibkan mempunyai kartu untuk transaksi retribusi harian. Pedangang harus mempunyai deposit di Bank Jateng. Apabila suatu saat pedagang tersebut tidak berjualan maka retribusi akan dikenakan secara akumulasi dihari berikutnya. Sebagai tahap awal E-Retribusi diberlakukan dipasar Nglano dan Matesih. E-Retribusi ini hanya dikenakan untuk retribusi kios. Rencana selanjutnya E-retribusi akan diterapkan di Pasar Tawangmangu dan Pasar Tuban.

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Produktivitas Paramakarya	Kementerian Ketenagakerjaan RI

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024. Total anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 23.332.816.768,- (Dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.923.422.385,- (Dua puluh satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau 93.96%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar sebesar Rp 1.409.394.383,- (Satu milyar empat ratus Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), atau 6.04%.

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu sebanyak 14 (empat belas) program, dan 78 (tujuh puluh delapan) sub kegiatan. Capaian kinerja berupa pencapaian indikator output maupun outcome sebagaimana terlampir pada bab III dan IV. Pencapaian indikator ini merupakan gambaran kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024

B. Saran

Agar penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dapat berjalan dengan baik maka tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan adalah :

- a. Memperkuat kinerja semua pelaksana dan pimpinan di Dinas.
- b. Memperkuat hubungan antara pemerintah, perusahaan dan asosiasi pekerja
- c. Memperkuat pendampingan pada pelaku usaha industri kecil.
- d. Meningkatkan layanan masyarakat tentang informasi ketenagakerjaan
- e. Meningkatkan kualitas mutu pelatihan berbasis kompetensi

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024. Laporan ini merupakan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pada Dinas dan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Karanganyar, 30 Desember 2024

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,
KABUPATEN KARANGANYAR



MARTADI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650323 198908 1 001